



DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

***Digital Leadership* dalam Pengelolaan Aset untuk Mencapai Akuntabilitas Publik Pemerintah Daerah Sumatera Selatan**

Sandi Fahlepi^{1*}, Kgs. M. Sobri², Andries Lionardo³, Abdul Nadjib⁴

¹Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia, 07013622227003@student.unsri.ac.id

²Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia, kgs.m.sobri@fisip.unsri.ac.id

³Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia, andrieslionardo@fisip.unsri.ac.id

⁴Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia, abduladjib@fisip.unsri.ac.id

*Corresponding Author: 07013622227003@student.unsri.ac.id

Abstract: *This study aims to analyze the role of Digital Leadership in asset management at the General and Equipment Bureau of the Regional Secretariat of South Sumatra Province. The research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques including in-depth interviews, observation, and document analysis. The results indicate that the implementation of digital leadership has improved efficiency, transparency, and accountability in regional asset governance. Digitalization in asset inventory, reporting, and monitoring processes has reduced inefficiencies and accelerated bureaucratic procedures. However, several challenges remain, such as limited IT infrastructure, low digital literacy, and insufficient training programs for employees. Recommendations include improving digital infrastructure, human resource training, system integration, and enhancing transparency and public participation. By addressing these challenges, the local government can optimize digital transformation in asset management, leading to improved public services and sustainable regional economic growth.*

Keywords: *Digital Leadership, Asset Management, Accountability, South Sumatra*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran **Digital Leadership** dalam pengelolaan aset di Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kepemimpinan digital telah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola aset daerah. Digitalisasi dalam proses inventarisasi, pelaporan, dan pengawasan aset telah mengurangi inefisiensi dan mempercepat proses birokrasi. Namun, beberapa tantangan masih dihadapi, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, rendahnya literasi digital, dan kurangnya program pelatihan bagi pegawai. Rekomendasi yang diajukan meliputi peningkatan infrastruktur digital, pelatihan SDM, integrasi sistem informasi, serta penguatan transparansi dan partisipasi masyarakat. Dengan mengatasi tantangan ini, pemerintah daerah dapat

mengoptimalkan transformasi digital dalam pengelolaan aset, mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi regional yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Digital Leadership*, Pengelolaan Aset, Akuntabilitas, Sumatera Selatan

PENDAHULUAN

Penerapan Digital Government di Indonesia ditandai dengan lahirnya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Kebijakan ini mengamanatkan implementasi sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi di seluruh tingkatan pemerintahan. Setiap instansi pemerintah mengaplikasikan e-Government melalui berbagai inovasi berbasis teknologi, termasuk pengembangan aplikasi yang mendukung pelayanan publik di berbagai sektor. Salah satu bentuk implementasinya adalah inovasi dalam tata kelola aset Sekretariat Daerah.

Pengelolaan serta pertanggungjawaban atas barang milik negara/daerah merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari pengelolaan dan akuntabilitas keuangan negara. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa aset negara/daerah merupakan hasil pengadaan yang didanai oleh APBN atau APBD, yang wajib dipertanggungjawabkan. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menegaskan bahwa perbendaharaan mencakup pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi serta kekayaan negara yang dipisahkan dan ditetapkan dalam APBN dan APBD. Dalam rangka meningkatkan tata kelola aset daerah, pemerintah mengeluarkan regulasi terbaru, yaitu Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Regulasi ini mencakup berbagai aspek, seperti perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Permendagri ini merupakan revisi serta penyempurnaan dari regulasi sebelumnya, yakni Permendagri No. 17 Tahun 2007, yang juga mengatur aspek serupa, dengan tambahan ketentuan mengenai penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pembiayaan, serta tuntutan ganti rugi. Dengan diterbitkannya Permendagri No. 19 Tahun 2016, pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola aset tetap barang milik daerah secara lebih optimal dan akuntabel.

Untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian (research gap) dalam topik ini, peneliti mengumpulkan artikel ilmiah dari database Scopus dengan menggunakan kata kunci “Digital Government” dan “Asset Management” serta menganalisis perkembangan kajian dalam rentang waktu 2015 hingga 2020.

Penelitian sebelumnya oleh Azuwandari dkk. (2022) mengenai pengelolaan aset tetap di Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan aset tetap telah mengikuti ketentuan dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016. Namun, pelaksanaannya belum optimal, terutama dalam aspek inventarisasi aset. Hambatan utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman sumber daya manusia terhadap pengelolaan aset tetap. Sementara itu, Hoerudin (2020) menyoroti kepemimpinan dalam era disrupsi, yang menuntut pemimpin untuk terus mengembangkan kapasitasnya. Dalam konteks digitalisasi, kepemimpinan yang efektif ditandai dengan kemampuan untuk berinovasi dalam kebijakan, bersikap dinamis, serta mengoptimalkan teknologi guna meningkatkan kualitas dan kompetensi anggota organisasi melalui komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi yang baik. Lebih lanjut, penelitian oleh Farida Dwi Cahyarini (2021) mengenai implementasi *digital leadership* dalam pelayanan publik mengungkapkan bahwa kepemimpinan digital berperan dalam mendorong pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital. Meskipun indikator layanan telah memuaskan pengguna, masih terdapat ruang untuk perbaikan di beberapa aspek. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi digital petugas pelayanan harus dilakukan secara sistematis dan terukur sesuai dengan standar kompetensi jabatan. Riyanto dkk. (2022) menambahkan bahwa kepemimpinan digital sangat penting dalam memastikan organisasi mampu beradaptasi dengan era digital. Pemimpin digital memiliki perspektif yang berbeda dibandingkan dengan pemimpin tradisional, karena mereka dituntut untuk memahami nilai aset digital dan menggunakannya secara strategis. Sayangnya, masih banyak organisasi yang belum menyadari pentingnya peran pemimpin digital, sehingga berisiko mengalami kegagalan operasional.

Dalam konteks pemerintahan daerah, Pergub Sumsel No. 55 Tahun 2016 mengatur tentang struktur organisasi serta tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Salah satu unit yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan aset adalah Biro Umum dan Perlengkapan, yang bertugas merumuskan kebijakan, melakukan koordinasi, serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam bidang penatausahaan umum, administrasi keuangan, dan pengelolaan aset. Namun, berdasarkan hasil observasi pra-penelitian, ditemukan sejumlah permasalahan dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset di biro tersebut. Tantangan utama meliputi belum optimalnya sistem yang digunakan serta keterbatasan pengetahuan pegawai mengenai tata kelola aset daerah. Pemerintah terus berupaya menciptakan birokrasi yang bersih dengan mengedepankan efisiensi dan efektivitas tata kelola serta peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur. Sebagaimana dinyatakan oleh Cordella & Tempini (2015), birokrasi menghadapi tantangan besar dalam menjalankan tugasnya secara efisien dan efektif, terutama dalam penyediaan layanan publik yang masih menjadi sorotan, sering kali terlihat dari berbagai tagar di media sosial yang mengkritik kualitas layanan pemerintahan.

Kepemimpinan digital (*digital leadership*) muncul sebagai respons terhadap perkembangan lingkungan berbasis elektronik atau *e-environment*. Pemimpin yang menerapkan prinsip kepemimpinan digital harus memiliki kesadaran tinggi terhadap dinamika digitalisasi dan mampu mengantisipasi berbagai risiko yang muncul, khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset digital. Digitalisasi dalam pengelolaan aset berperan dalam mengevaluasi dan mengoptimalkan kinerja operasional, melaksanakan aksi preventif sebelum terjadinya kegagalan sistem dengan analisis prediktif, serta meningkatkan efisiensi biaya perbaikan atau penggantian aset akibat kerusakan mendadak. Oleh karena itu, peran kepemimpinan sangatlah krusial, mengingat transformasi digital tidak hanya berfokus pada pengembangan infrastruktur teknologi informasi, tetapi juga mencakup pembentukan pola pikir digital (*digital mindset*) serta budaya berbasis data (*data-driven culture*). Perubahan paradigma ini tentu memerlukan waktu dan strategi yang matang.

Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada *Digital Leadership* dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset di Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan utama, yaitu bagaimana kepemimpinan digital memengaruhi proses pengelolaan aset serta dampaknya terhadap efisiensi dan efektivitas tata kelola aset di Provinsi Sumatera Selatan.

METODE

Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai *Digital Leadership* dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset di Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat menggali secara mendalam dinamika kepemimpinan digital serta penerapannya dalam administrasi publik. Sebagaimana dikemukakan oleh Moleong (2014), bahwa penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek secara menyeluruh (holistik) dengan menggunakan narasi dalam konteks alamiah, serta memanfaatkan berbagai teknik pengumpulan data yang relevan.

Penelitian ini berfokus pada faktor pendukung dan penghambat implementasi kepemimpinan digital dalam pengelolaan aset, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip akuntabilitas publik, seperti akuntabilitas hukum, proses, program, dan kebijakan. Lokasi penelitian ditetapkan di Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dengan pemilihan informan berdasarkan peran strategis mereka dalam tata kelola aset pemerintah daerah. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan utama, observasi langsung terhadap praktik kepemimpinan digital, serta analisis dokumen yang relevan, seperti peraturan dan laporan resmi.

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti model yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang mencakup tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik, seperti triangulasi sumber dan metode, perpanjangan observasi, serta pengecekan sejawat, guna memastikan kredibilitas temuan yang dihasilkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset pada Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah merupakan strategi yang diterapkan oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan seluruh aset yang dimiliki sebagai bagian dari kekayaan daerah. Tujuan utama dari upaya ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan aset yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dalam implementasinya, pengelolaan aset daerah tidak hanya berorientasi pada peningkatan nilai ekonomis aset, tetapi juga harus mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, serta kesejahteraan sosial sebagaimana diamanatkan dalam nilai-nilai Pancasila (Putro, 2024).

Di Provinsi Sumatera Selatan, pengelolaan aset daerah awalnya masih dilakukan secara manual atau berbasis dokumen fisik (paper-based). Namun, sejak tahun 2018, pemerintah daerah mulai mengadopsi dan mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna mendukung berbagai aspek pemerintahan, khususnya dalam pelayanan publik. Kendati demikian, berdasarkan hasil observasi, pengelolaan dan pemanfaatan aset di Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan masih belum mencapai tingkat optimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa kendala, antara lain keterbatasan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola aset serta belum sepenuhnya terintegrasinya sistem digital dalam tata kelola aset.

Menurut Azuwandri dan Putra (2022), keberhasilan dalam pengelolaan aset sangat bergantung pada dua faktor utama, yakni SDM yang kompeten dan sistem yang terintegrasi. Kedua elemen ini menjadi faktor krusial dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola aset. Namun, implementasi sistem digital di Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan masih mengalami hambatan, terutama dalam aspek inventarisasi aset dan pengelolaan data. Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Sumsel, Bapak H. Sandi Fahlepi, yang mengungkapkan:

“Salah satu kendala utama yang kami temui adalah kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa sistem digitalisasi membutuhkan perangkat teknologi yang memadai dan jaringan yang stabil. Di beberapa bagian, masih terdapat keterbatasan dalam hal perangkat serta sistem yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik. Selain itu, tenaga kerja yang terbiasa dengan sistem manual, terutama bagi yang sudah berusia, membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem baru ini.” (Wawancara, 5 Februari 2025).

Selain tantangan teknis, penelitian ini juga menemukan bahwa sebagian besar proses pengelolaan aset masih mengandalkan metode manual, yang menyebabkan lambatnya pelaporan dan pengawasan. Hal ini berdampak pada efektivitas tata kelola aset yang masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, pengembangan sistem manajemen aset berbasis digital menjadi kebutuhan mendesak. Digitalisasi diyakini dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan aset (Jiang, Henning, & Zou, 2022).

Untuk memastikan keberhasilan implementasi sistem digital dalam pengelolaan aset, diperlukan kepemimpinan digital (*digital leadership*) yang efektif. Klein (2020) menjelaskan bahwa kepemimpinan digital terdiri atas tiga komponen utama. **Pertama, visi inovatif**, yaitu kemampuan seorang pemimpin dalam mengidentifikasi peluang di masa depan dan menyusun strategi berbasis teknologi digital guna mencapai tujuan organisasi. Visi ini tidak hanya terkait dengan penggunaan teknologi, tetapi juga bagaimana teknologi dapat merevolusi cara kerja, meningkatkan efisiensi, serta menciptakan nilai tambah bagi organisasi. Seorang pemimpin digital harus memiliki pola pikir visioner yang mampu merespons perkembangan teknologi dengan fleksibel serta memanfaatkan inovasi untuk meningkatkan kinerja organisasi. Dalam konteks Biro Umum dan Perlengkapan Setda Sumsel, adopsi teknologi digital dalam pengelolaan aset dan pelayanan publik masih berada dalam tahap awal. Upaya penerapan sistem informasi manajemen aset (SIMDA) serta *e-government* telah dilakukan, namun implementasinya masih menghadapi tantangan. Banyak pemimpin dan pegawai belum sepenuhnya memahami bagaimana teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dapat meningkatkan efisiensi serta transparansi dalam pengelolaan aset. Indikasi dari hal ini adalah masih dominannya metode manual dalam pelaporan dan pengawasan aset. Kurangnya visi strategis terkait transformasi digital juga menyebabkan tidak adanya arah yang jelas dalam upaya modernisasi sistem. Selain itu, kendala infrastruktur teknologi informasi, seperti jaringan internet yang tidak stabil dan belum merata, turut menjadi faktor penghambat implementasi visi inovatif. Oleh sebab itu, pemerintah Sumatera Selatan perlu menetapkan visi digital yang jelas dan menyelaraskannya dengan tren global dalam tata kelola aset, disertai dengan investasi yang memadai dalam infrastruktur teknologi informasi. **Kedua, kemampuan dalam mengelola kompleksitas**, yang merujuk pada kemampuan seorang pemimpin untuk menghadapi tantangan yang muncul akibat perubahan teknologi yang pesat, dinamika pasar yang terus berkembang, serta lingkungan yang penuh ketidakpastian. Pemimpin digital harus mampu menavigasi kompleksitas ini dengan analisis mendalam serta strategi mitigasi risiko yang tepat. Menurut Lindov (2024), pemimpin digital harus menunjukkan kemampuan beradaptasi yang tinggi

dan menumbuhkan budaya pembelajaran berkelanjutan dalam organisasi. Dalam konteks penelitian ini, pengelolaan aset di Sumatera Selatan menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya integrasi data, lambatnya proses pelaporan, serta minimnya mekanisme pengawasan. Di samping itu, perubahan regulasi yang cepat, misalnya revisi Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, menambah kompleksitas dalam pengelolaan aset. Sebagian besar pemimpin dan pegawai belum memiliki keterampilan analitis yang memadai untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan tersebut. Selain itu, risiko keamanan siber dan kebocoran data belum sepenuhnya dikelola dengan baik, yang berpotensi mengancam integritas sistem pengelolaan aset. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah daerah perlu menyediakan program pelatihan guna meningkatkan kompetensi pegawai dalam analisis data serta manajemen risiko, termasuk aspek keamanan siber dan tata kelola data aset. **Ketiga, keterampilan dalam memanfaatkan teknologi digital**, yang mencakup pemahaman mendalam mengenai teknologi digital serta bagaimana penggunaannya dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sposato (2024) serta Al-Hadrawi & Reniati (2023) menegaskan bahwa kepemimpinan digital tidak hanya bergantung pada pemanfaatan perangkat digital, tetapi juga pada literasi digital serta penggunaan data dalam pengambilan keputusan strategis. Dalam konteks penelitian ini, banyak pegawai di Sumatera Selatan masih memiliki keterbatasan dalam literasi digital, yang berdampak pada rendahnya pemanfaatan sistem informasi manajemen aset serta aplikasi e-government. Data yang tersedia belum dioptimalkan untuk analisis prediktif atau perencanaan strategis, sehingga menghambat pengambilan keputusan berbasis bukti. Selain itu, keterbatasan anggaran serta kurangnya perangkat teknologi yang memadai juga menjadi faktor penghambat dalam pemanfaatan teknologi digital. Oleh karena itu, diperlukan program literasi digital yang komprehensif untuk meningkatkan keterampilan pegawai dalam menggunakan sistem informasi berbasis teknologi serta memanfaatkan data aset secara optimal guna mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan berbasis bukti.

Berdasarkan indikator kepemimpinan digital yang dikemukakan oleh Klein (2020), Pemerintah Sumatera Selatan masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengimplementasikan transformasi digital dalam tata kelola aset. Namun, dengan memperkuat visi inovatif, meningkatkan kapasitas dalam mengelola kompleksitas, serta memperdalam keterampilan dalam pemanfaatan teknologi digital, transformasi digital dapat diwujudkan secara lebih efektif. Investasi dalam infrastruktur teknologi, pelatihan SDM, serta optimalisasi data menjadi kunci utama dalam mengatasi kendala yang ada. Dengan demikian, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset serta pelayanan publik secara berkelanjutan.

Dampak *Digital Leadership* dalam Pengelolaan Aset

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Digital Leadership yang efektif menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi dan adopsi sistem digital dalam sektor pemerintahan. Transformasi digital dalam pengelolaan aset telah memberikan dampak yang signifikan secara global, terutama dalam peningkatan efisiensi serta transparansi dalam tata kelola aset publik. Di Amerika Serikat, pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan aset telah terbukti mampu menekan biaya operasional sekaligus meningkatkan akuntabilitas publik. Carayannis (2016) menegaskan bahwa inovasi teknologi digital memungkinkan pemerintah AS untuk mengintegrasikan berbagai sistem informasi guna mempermudah pengawasan dan pelaporan aset secara lebih efisien.

Sementara itu, di Rusia, transformasi digital memainkan peran strategis dalam pengelolaan aset regional, meningkatkan daya saing antar wilayah. Pengenalan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih tidak hanya mendorong transformasi interaksi antar wilayah tetapi juga berkontribusi terhadap diferensiasi ekonomi regional (*Digitalisation of*

the Economy and Regional Development, 2022). Di Ukraina, penerapan digitalisasi dalam pengelolaan aset daerah berkontribusi terhadap optimalisasi alokasi sumber daya, peningkatan kualitas pengambilan keputusan, serta memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan. Dengan memanfaatkan sistem manajemen cerdas dan analisis data, efisiensi serta transparansi pengelolaan aset daerah meningkat secara signifikan, mendukung strategi pembangunan yang berkelanjutan. Adaptasi teknologi digital modern menjadi elemen krusial dalam menghadapi tantangan ekonomi dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam skala nasional. Terakhir, di Selandia Baru, integrasi sistem informasi manajemen aset (AMIS) telah menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan aset infrastruktur. Jiang, Henning, dan Zou (2022) mencatat bahwa pemanfaatan teknologi seperti Building Information Modeling (BIM) dan Geographic Information System (GIS) memungkinkan pemerintah Selandia Baru untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset serta mengurangi risiko terhadap infrastruktur.

Di Indonesia sendiri, penerapan Digital Leadership dalam pengelolaan aset daerah masih dalam tahap pengembangan, meskipun beberapa daerah telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Di Kabupaten Buton Selatan, transformasi digital berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas pengelolaan aset regional serta mendorong kolaborasi antarpemangku kepentingan guna mencapai hasil yang lebih optimal (Nastia, 2024). Sementara itu, DKI Jakarta telah lebih dahulu mengadopsi sistem informasi manajemen aset berbasis digital sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola aset daerah. Mahmudi (2011) menyatakan bahwa penerapan teknologi digital dalam pengelolaan aset terbukti mampu membantu pemerintah DKI Jakarta dalam menekan praktik korupsi sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Di Jawa Barat, implementasi sistem informasi manajemen aset berbasis digital telah menunjukkan dampak positif dalam peningkatan efisiensi serta transparansi pengelolaan aset daerah. Menurut Subarsono (2005), pemanfaatan teknologi digital turut membantu pemerintah dalam menekan biaya operasional dan meningkatkan akuntabilitas publik. Sementara itu, di Bali, penerapan Digital Leadership dalam pengelolaan aset berkontribusi terhadap optimalisasi pemanfaatan aset sektor pariwisata. Digitalisasi ini memungkinkan pemerintah daerah meningkatkan pendapatan daerah sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan publik. Suryono (2010) menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam tata kelola aset pariwisata turut meningkatkan daya saing daerah secara global.

Dalam konteks Sumatera Selatan, meskipun implementasi Digital Leadership serta adopsi teknologi digital dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah masih berada dalam tahap awal, dampaknya telah cukup signifikan. Penerapan sistem informasi manajemen aset, seperti SIMDA dan aplikasi e-government lainnya, memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi operasional instansi pemerintahan. Digitalisasi dalam proses inventarisasi, pelaporan, dan pengawasan aset yang sebelumnya bersifat manual dan memakan waktu kini dapat diotomatisasi, sehingga mengurangi inefisiensi dan pemborosan sumber daya. Pengelolaan aset berbasis digital juga berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas instansi dengan mengurangi tingkat kesalahan administrasi serta mempercepat proses birokrasi. Pada akhirnya, penerapan digitalisasi ini berimplikasi pada peningkatan jumlah aset yang tercatat secara signifikan di Sumatera Selatan, sebagaimana dapat diamati dalam peningkatan jumlah aset dalam rentang waktu satu tahun (2023–2024).



Sumber: DJPb Sumatera Selatan, 2024

Gambar 2. Perbandingan Aset Sumatera Selatan Tahun 2023-2024

Digital Leadership dan transformasi digital memiliki peran strategis dalam meningkatkan transparansi dalam pengelolaan aset daerah. Dengan adanya sistem digital yang terintegrasi, akses terhadap data aset dapat dilakukan secara real-time oleh pihak-pihak yang berwenang, termasuk masyarakat. Mekanisme ini memungkinkan publik untuk memantau pemanfaatan aset daerah secara terbuka, sehingga berkontribusi dalam mengurangi praktik korupsi sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Transparansi dalam tata kelola aset publik merupakan elemen fundamental dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintahan. Dalam konteks ini, Drs. H. Edward Candra, M.H.A., selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, menegaskan bahwa:

“Sistem digital yang terintegrasi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah. Dengan adanya digitalisasi, data aset dapat diakses secara real-time oleh pihak-pihak yang berwenang, termasuk masyarakat. Hal ini memungkinkan publik untuk mengetahui bagaimana aset daerah dikelola dan dimanfaatkan, sehingga meminimalisir potensi penyalahgunaan atau praktik korupsi serta meningkatkan transparansi. Kami percaya dengan proses yang lebih transparan seperti sekarang akan membangun kepercayaan publik yang lebih baik terhadap pemerintah. Ketika masyarakat dapat mengakses informasi terkait aset daerah secara terbuka, mereka akan merasa lebih yakin bahwa pemerintah bekerja dengan integritas dan bertanggung jawab. Ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan, yang pada akhirnya akan memperkuat sistem tata kelola pemerintahan yang baik.” (Wawancara, 10 Februari 2025)

Sejalan dengan peningkatan transparansi, digitalisasi juga memperkuat akuntabilitas dalam tata kelola aset di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sumatera Selatan. Setiap transaksi serta pemanfaatan aset dapat terdokumentasi secara sistematis melalui platform digital, sehingga mempermudah proses audit serta pengawasan internal maupun eksternal. Peningkatan akuntabilitas ini memastikan bahwa aset publik dikelola secara optimal serta sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga mencegah inefisiensi dalam penggunaan sumber daya. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Pengembangan berbagai platform digital, seperti aplikasi dan situs web resmi pemerintah, memungkinkan penyediaan layanan publik secara daring, mencakup proses perizinan hingga mekanisme pelaporan masyarakat. Transformasi ini memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan secara lebih cepat, efisien, dan transparan.

Digital Leadership juga memiliki dampak positif terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Setda Provinsi Sumatera Selatan. Melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan keterampilan digital, aparatur sipil negara (ASN) diharapkan mengadaptasi serta mengoptimalkan teknologi dalam mendukung tugas-tugas pemerintahan. Namun demikian, saat ini implementasi tersebut belum sepenuhnya merata, mengingat masih terdapat sejumlah pegawai yang belum mengadopsi perubahan digitalisasi secara optimal. Kendati demikian, peningkatan literasi digital di kalangan pegawai akan mendorong lahirnya inovasi serta kreativitas dalam menjalankan tugas pemerintahan, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja instansi. Lebih lanjut, digitalisasi juga membawa manfaat dari sisi pengurangan biaya operasional. Penggunaan teknologi dalam tata kelola aset memungkinkan pengurangan kebutuhan terhadap dokumen fisik, ruang penyimpanan, serta tenaga kerja administratif manual. Dengan demikian, efisiensi dalam pengelolaan anggaran dapat tercapai, memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya ke program-program prioritas yang memiliki dampak lebih besar bagi masyarakat. Pada tingkat yang lebih luas, penerapan *Digital Leadership* dan digitalisasi dalam pengelolaan aset serta pelayanan publik juga berkontribusi terhadap peningkatan daya saing Sumatera Selatan di tingkat nasional. Dengan tata kelola yang lebih efisien dan transparan, daerah ini memiliki potensi lebih besar dalam menarik investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Wilayah yang berhasil mengadopsi teknologi digital dengan baik cenderung lebih kompetitif dalam menarik investasi serta mengembangkan sektor-sektor strategis yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Digital Leadership

Meskipun *Digital Leadership* telah memberikan berbagai manfaat dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan temuan empiris, terdapat sejumlah faktor yang berperan sebagai pendorong maupun penghambat dalam penerapannya di Sumatera Selatan.

Adapun faktor-faktor yang mendukung keberhasilan *Digital Leadership* di Sumatera Selatan mencakup:

1. Kebijakan Pemerintah yang Mendukung Transformasi Digital : Regulasi yang dikeluarkan pemerintah, seperti Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, telah menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung implementasi *Digital Leadership*. Kebijakan ini mengarahkan pemerintah daerah untuk mengadopsi teknologi digital dalam tata kelola aset, sehingga mendorong peningkatan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaannya.
2. Dukungan dari Pimpinan Daerah: Komitmen dan visi yang kuat dari pimpinan daerah memainkan peran krusial dalam mendorong adopsi *Digital Leadership*. Kepemimpinan yang proaktif dalam mendukung transformasi digital dapat meningkatkan motivasi serta kesiapan aparatur untuk mengintegrasikan teknologi digital dalam sistem pengelolaan aset daerah.
3. Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi: Infrastruktur teknologi informasi yang memadai, seperti akses internet berkecepatan tinggi dan ketersediaan perangkat keras yang modern, menjadi faktor fundamental dalam penerapan *Digital Leadership*. Dengan infrastruktur yang memadai, pemerintah daerah dapat mengintegrasikan berbagai sistem informasi guna memperkuat proses pengawasan dan pelaporan aset secara lebih efektif.

Namun demikian, implementasi *Digital Leadership* di Sumatera Selatan juga menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi menghambat optimalisasi teknologi digital dalam pengelolaan aset daerah. Faktor-faktor penghambat tersebut meliputi:

1. Terbatasnya Infrastruktur Teknologi Informasi: Keterbatasan infrastruktur digital, terutama di wilayah terpencil, menjadi kendala utama dalam penerapan Digital Leadership. Jaringan internet yang masih tidak stabil dan berkecepatan rendah menghambat proses digitalisasi, sehingga mengurangi efektivitas sistem yang berbasis teknologi.
2. Rendahnya Tingkat Literasi Digital: Kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam mengadopsi teknologi digital masih menjadi tantangan signifikan. Kurangnya keterampilan digital di kalangan pegawai pemerintah daerah menyebabkan rendahnya efektivitas dalam pemanfaatan sistem berbasis teknologi untuk pengelolaan aset.
3. Kurangnya Program Pelatihan dan Pengembangan SDM: Keterbatasan akses terhadap pelatihan serta pengembangan kapasitas SDM menjadi salah satu faktor yang menghambat implementasi Digital Leadership. Banyak pegawai belum memperoleh pelatihan yang memadai terkait pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan aset, sehingga proses digitalisasi belum berjalan secara optimal.

Memahami faktor-faktor pendukung dan penghambat ini menjadi langkah awal bagi pemerintah daerah dalam merancang strategi yang lebih komprehensif guna mengoptimalkan penerapan Digital Leadership. Peningkatan infrastruktur digital serta penguatan kapasitas SDM melalui program pelatihan yang berkelanjutan merupakan langkah strategis yang perlu diambil guna mengatasi kendala yang ada. Dengan demikian, keberlanjutan transformasi digital dalam pengelolaan aset daerah di Sumatera Selatan dapat terwujud secara lebih efektif dan berdaya guna.

Model Digital Leadership yang Ideal untuk Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset

Berdasarkan hasil penelitian, model Digital Leadership yang ideal dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset di Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan harus mencakup beberapa elemen fundamental. Pertama, kepemimpinan dalam konteks digital wajib berlandaskan visi dan misi yang konkrit mengenai pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi serta akuntabilitas dalam tata kelola aset. Kedua, pemimpin harus mampu menciptakan budaya organisasi yang adaptif terhadap inovasi dan perkembangan teknologi, sehingga memungkinkan transformasi digital berjalan secara optimal. Dalam hal ini, Oberer dan Erkollar (2018) menegaskan bahwa kepemimpinan digital yang efektif memerlukan figur pemimpin yang tidak hanya mampu mengintegrasikan teknologi digital ke dalam strategi organisasi, tetapi juga dapat mendorong kolaborasi lintas sektor guna mencapai tujuan bersama. Sejalan dengan pemikiran tersebut, model Digital Leadership yang diusulkan dalam penelitian ini mencakup beberapa aspek utama, yaitu peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan digital, pengembangan infrastruktur teknologi informasi yang memadai, serta penerapan sistem terintegrasi guna mendukung pengelolaan aset yang lebih transparan dan efisien.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan Digital Leadership dalam pengelolaan aset di Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola aset daerah. Meskipun implementasi teknologi digital masih berada pada tahap awal, dampak positifnya telah terlihat melalui peningkatan signifikan dalam jumlah aset yang tercatat selama periode satu tahun (2023-2024). Proses digitalisasi dalam inventarisasi, pelaporan, dan pengawasan aset telah berhasil mengurangi inefisiensi, meminimalkan pemborosan sumber daya, serta mempercepat proses birokrasi. Selain itu, sistem digital yang terintegrasi telah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memungkinkan masyarakat untuk memantau pemanfaatan aset daerah secara

real-time, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan aset dan praktik korupsi. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang menghambat optimalisasi Digital Leadership, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, rendahnya tingkat literasi digital di kalangan pegawai, dan kurangnya program pelatihan yang memadai.

Untuk mengatasi tantangan ini, berikut adalah beberapa rekomendasi strategis yang dapat diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Selatan:

1. Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi: Pemerintah daerah perlu memperkuat infrastruktur teknologi informasi, terutama di wilayah terpencil, dengan menyediakan jaringan internet yang stabil dan berkecepatan tinggi. Hal ini akan mendukung integrasi sistem digital dalam pengelolaan aset dan memastikan akses yang merata bagi seluruh instansi pemerintah.
2. Program Pelatihan dan Pengembangan SDM: Pemerintah daerah harus menyelenggarakan program pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) secara berkelanjutan, khususnya dalam hal literasi digital dan pemanfaatan teknologi informasi. Pelatihan ini harus mencakup penggunaan sistem informasi manajemen aset (SIMDA) dan aplikasi e-government, serta pengembangan keterampilan analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.
3. Penguatan Visi dan Misi Digital: Pemerintah daerah perlu menetapkan visi dan misi yang jelas terkait transformasi digital dalam pengelolaan aset. Visi ini harus mencakup tujuan jangka panjang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, serta mendorong inovasi dalam tata kelola aset. Pemimpin daerah harus menjadi teladan dalam mengadopsi dan mempromosikan budaya digital di lingkungan kerja.
4. Integrasi Sistem Informasi Manajemen Aset: Pemerintah daerah harus mengintegrasikan berbagai sistem informasi manajemen aset (SIMDA) dengan platform digital lainnya, seperti aplikasi e-government dan sistem pelaporan berbasis web. Integrasi ini akan mempermudah proses inventarisasi, pelaporan, dan pengawasan aset, serta meningkatkan akurasi data aset.
5. Peningkatan Transparansi dan Partisipasi Masyarakat: Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa data aset dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat melalui platform digital. Hal ini akan meningkatkan transparansi dan memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan aset daerah. Selain itu, pemerintah dapat mengembangkan mekanisme umpan balik dari masyarakat untuk meningkatkan kualitas layanan publik.
6. Penguatan Keamanan Siber dan Tata Kelola Data: Pemerintah daerah harus memperkuat sistem keamanan siber untuk melindungi data aset dari ancaman kebocoran atau serangan siber. Selain itu, perlu diterapkan kebijakan tata kelola data yang ketat untuk memastikan integritas dan keamanan data aset.
7. Kolaborasi dengan Stakeholder dan Lembaga Pendidikan: Pemerintah daerah dapat menjalin kolaborasi dengan lembaga pendidikan, swasta, dan organisasi non-pemerintah untuk mengembangkan inovasi teknologi dalam pengelolaan aset. Kolaborasi ini dapat mencakup program penelitian, pengembangan aplikasi, dan pelatihan bersama untuk meningkatkan kapasitas SDM.

Dengan menerapkan rekomendasi ini, Pemerintah Daerah Sumatera Selatan dapat mengoptimalkan penerapan Digital Leadership dalam pengelolaan aset, sehingga mencapai tata kelola yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi regional yang berkelanjutan.

REFERENSI

- Al-Hadrawi, B. K., & Reniati, R. (2023). *Digital Leadership: Navigating the Future with Strategic Conviction*. <https://doi.org/10.33019/ijomm.v1i2.23>
- Azuwandri dan Muhammad Bima Eka Putra. 2022. *Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah*. Jurnal Administrasi Bisnis Nusantara. e-ISSN: 2828-1136 Vol. 1 No. 2 Juli 2022 page: 81 – 94.
- Carayannis, Elias G. 2016. *Inovation, Technology, and Knowledge Management*. Springer. Switzerland.
- Cordella, A., & Tempini, N. (2015). E-government and organizational change: Reappraising the role of ICT and bureaucracy in public service delivery. *Government information quarterly*, 32(3), 279-286.
- Digitalisation of the Economy and Regional Development* (pp. 133–147). (2022). Springer eBooks. https://doi.org/10.1007/978-3-030-94617-3_11
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Povinsi Sumatera Selatan. (2024). *Flash Report Government Finance Statistic Triwulan III 2024*. Palembang : DJPb Provinsi Sumsel
- Farida Dwi Cahyarini. 2021. *Implementasi Digital Leadership dalam Pengembangan Kompetensi Digital pada Pelayanan Publik*. Jurnal Studi Komunikasi Dan Media Vol. 25 No. 1 Juni 2021 Hal : 47 – 60
- Hoerudin, C. W. (2020). Adaptive Leadership in Digital Era. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1).
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*
- Jiang, J., Henning, T. F. P., & Zou, Y. (2022). *Multiple System Integration in Local Government Asset Management: A New Zealand Case Study*. *Journal of Public Administration and Governance*, 12(3), 45-60.
- Klein, M. (2020). *Leadership Characteristics in The Era of Digital Transformation*. *Business & Management Studies: An International Journal*, 8 (1), 883–902.
- Lathabhavan, R., & Keisham, B. (2024). *Digital Leadership*. Elsevier BV. <https://doi.org/10.1016/b978-0-443-13701-3.00032-3>
- Lindov, I. (2024). Leadership impact on the effectiveness in digitalised it organisations. *Science International Journal*, 3(3), 153–158. <https://doi.org/10.35120/sciencej03031531>
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit UII Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. 3rd.
- Moleong, J. (2014). *Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Cet. XXI*.
- Nastia, N. (2024). Transformasi digital melalui inovasi e-government pada pemerintah daerah kabupaten buton selatan. *Governance /Governance*, 12(2), 268–281. <https://doi.org/10.33558/governance.v12i2.9799>
- Oberer, B., & Erkollar, A. (2018). *Digital Leaders in the Age*. *International Journal of Organizational Leadership*, 7404, 404–412.
- Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, uraian tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Putro, W. sabdono. (2024). The Implementation Of Supervision Regional Financial And Asset Management Perspective Justice Of Pancasila. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum (Edisi Elektronik)*, 23(3), 1797–1819. <https://doi.org/10.31941/pj.v23i3.4885>
- Riyanto Wujarso, Bayu Seno Pitoyo, Roy Prakoso. 2022. *Peran Kepemimpinan Digital dalam Era Digital*. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting*

- and Research. e-ISSN: 2598-8719 (Online), pISSN: 2598-8700 (Printed) , Vol. 7 No.1, Februari 2023
- Sposato, M. (2024). Digital Leadership in Organizations for Digital Transformation. *Advances in Human Resources Management and Organizational Development Book Series*, 77–96. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-7086-5.ch004>
- Subarsono, AG.. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Fajar.
- Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. UB Press. Malang.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara